

**ANTISIPASI KEKERINGAN MELUAS, PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
GELONTORKAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)  
SEBESAR Rp114 JUTA**



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.tribunnews.com/2023/10/02/bpbd-kota-semarang-dapat-tambahan-suntikan-anggaran-btt-rp-114-juta-untuk-atasi-kekeringan>

**Isi Berita:**

**HALO SEMARANG** – Dampak musim kemarau panjang di Ibu Kota Jawa Tengah diprediksi masih akan terus berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Bahkan, beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih pun semakin meluas.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick Bagus Yudhistira menjelaskan, Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD mencairkan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 114 juta, sebagai bentuk respon membantu masyarakat yang membutuhkan.

Anggaran BTT ini dicairkan lantaran sebelumnya pagu anggaran pada APBD Kota Semarang murni tahun 2023 ini telah habis.

“Karena anggaran kita untuk bantuan air bersih sudah habis, jadi kita mendapatkan anggaran BTT untuk *dropping* air ke masyarakat, besarnya sekitar Rp 114 juta,” ujarnya, Senin (2/10/2023).

Patrick juga menjelaskan, anggaran ini nantinya akan disalurkan dalam bentuk 570 unit tangki air, untuk disebar ke warga yang membutuhkan bantuan air bersih.

“Nanti akan diwujudkan ke 570 tangki untuk dikirimkan ke wilayah terdampak kemarau panjang,” ujarnya.

Total saat ini, lanjut Patrick, ada sebanyak 17 titik di 10 kelurahan yang membutuhkan bantuan *dropping* air bersih, yakni di Kelurahan Kedungpane tiga titik, Kelurahan

Bringin empat titik, Wonosari tiga titik. Lalu di Gondoriyo, Jabungan, Rowosari, Cepoko, Gedawang, Wonoplumbon, dan Meteseh masing-masing ada satu titik.

“Jumlah titik kekeringan saat ini bertambah, di Gondoriyo dan Wonosari, Ngaliyan dan Cepoko Gunungpati saat ini membutuhkan air bersih juga,” ungkap nya.

Sedangkan jumlah kebutuhan per titik tersebut juga berbeda tergantung kebutuhan dan jumlah warga yang terdampak. Paling banyak, kata dia, ada di RT 02 RW 02 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Ngaliyan yang membutuhkan dua tangki air per hari.

“Jumlah *dropping* berbeda-beda tergantung kebutuhan. Selain menggunakan dana BTT, dalam *dropping* air ke masyarakat ada bantuan dari anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta dan BUMN,” pungkasnya. (HS-06)

### Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/antisipasi-kekeringan-meluas-pemkot-semarang-gelontorkan-anggaran-btt-sebesar-rp-114-juta>, “Antisipasi Kekeringan Meluas, Pemkot Semarang Gelontorkan Anggaran BTT Sebesar Rp114 Juta”, tanggal 2 Oktober 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/02/bpbd-kota-semarang-dapat-tambahan-suntikan-anggaran-btt-rp-114-juta-untuk-atasi-kekeringan>, “BPBD Kota Semarang Dapat Tambahan Suntikan Anggaran BTT Rp114 Juta untuk Atasi Kekeringan”, tanggal 2 Oktober 2023.

### Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD mencairkan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 114 juta, sebagai bentuk respon membantu masyarakat yang membutuhkan. Anggaran BTT ini dicairkan lantaran sebelumnya pagu anggaran pada APBD Kota Semarang murni tahun 2023 ini telah habis. Selain menggunakan dana BTT, dalam *dropping* air ke masyarakat ada bantuan dari anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta dan BUMN
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>8</sup>
- Berdasarkan peraturan UU Perseroan Terbatas dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban. Hal ini tercantum dalam UU 40/2007 Pasal 47 ayat 2.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

<sup>9</sup> *Ibid*

- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.<sup>10</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>10</sup> *Ibid*